

**PEMBANGUNAN DAN MODERNISASI:  
IMPLIKASINYA TERHADAP TATANAN EKOLOGI DAN  
SOSIAL**

**Aleksius Jemadu<sup>64</sup>**

**ABSTRACT**

*The paper starts from an idea that there is a fundamental difference between modernization and development. The former puts too much emphasis on industrialization with the effect that the social and ecological dimension of development is not adequately addressed. A genuine economic development should take into account social problems and ecological conservation. The incorporation of this social dimension into Indonesian economic development has been made more difficult after the economic crisis hit Indonesia in 1997. Therefore, an alternative model of economic development is needed so that the state and market might play their appropriate role in producing economic welfare for the people.*

**Pendahuluan**

Sudah lebih dari setengah abad sebagai negara merdeka dan berdaulat Indonesia telah berusaha mencapai tujuan-tujuan sosial, politik dan ekonomi dari masyarakatnya. Tujuan-tujuan tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan hidup, keadilan sosial dan rasa aman bagi setiap anggota masyarakat (human security). Pencapaian tujuan-tujuan ini dilakukan melalui berbagai macam cara termasuk pembangunan, modernisasi, demokratisasi dan pembaharuan ekonomi (economic reform). Harus diakui bahwa hasil yang dicapai sekarang ini masih jauh dari memuaskan karena masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan perumahan. Apalagi setelah krisis ekonomi sejak tahun 1997 keterpurukan ekonomi telah mempersulit jutaan rakyat baik di kota maupun pedesaan. Pada saat yang sama lingkungan hidup juga semakin rusak dengan semakin seringnya terjadi banjir dan tanah longsor, penggundulan hutan, kebakaran hutan setiap tahun dan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat yang dulunya bergantung pada hasil hutan. Gambaran yang suram dari kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia ini menimbulkan pertanyaan: ada apa dengan pembangunan dan modernisasi yang digembar-gemborkan selama ini? Mengapa kondisi kehidupan rakyat tidak semakin baik dan

---

<sup>64</sup> Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNPAR Bandung.

bahkan sebaliknya semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan yang permanen? Sementara itu di beberapa daerah yang dilanda konflik seperti Aceh dan Papua rakyat kecil semakin kehilangan rasa aman karena menjadi korban yang tidak berdosa akibat konflik negara dengan kelompok separatis. *State security* dalam kenyataannya berhubungan secara *zero-sum game* dengan *human security*. Aceh dan Papua yang kaya akan sumberdaya alam ternyata menjadi kantong-kantong kemiskinan yang kemudian melahirkan tindak kekerasan sebagai senjata untuk melawan ketidakadilan sosial. Orang lalu mempertanyakan benarkah masyarakat modern merupakan cita-cita yang bisa membahagiakan semua orang atau hanya bagi kepentingan sekelompok orang yang mendapat privilese politik dan ekonomi dari negara?

Pada saat yang sama di tingkat global juga terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara negara-negara kaya dan miskin. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang menjadi korban dari struktur ekonomi politik global yang penuh dengan ketidakadilan. Di bawah himpitan utang luar negeri yang sangat besar Indonesia harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang bertambah setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dicapai sejak decade 1980an sampai pertengahan 1990an menjadi sia-sia karena habis terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi dari krisis yang tak kunjung teratasi. Krisis ekonomi yang melanda Asia dalam tahun-tahun terakhir membuktikan bahwa integrasi ke dalam kapitalisme global mengandung resiko yang harus diantisipasi oleh setiap negara jika ingin menjadi *winners* dalam proses tersebut dan bukannya sebagai *losers*. Dapatkah Indonesia belajar dari negara-negara lain seperti Jepang, Singapore dan Korea Selatan yang lebih berhasil menyikapi globalisasi sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyatnya?

### **Membedakan Modernisasi dan Pembangunan**

Ada berbagai pengertian tentang modernisasi. Dankwart A. Rustow, misalnya, mengidentikkannya dengan industrialisasi di mana kerjasama antar manusia menciptakan kontrol atas alam. Cyril E. Black et.al mendefinisikan modernisasi sebagai proses transformasi masyarakat sebagai akibat dari revolusi penggunaan ilmu dan teknologi. Menurut Remigio E. Agpalo ada dua faktor utama dalam defisini modernisasi yaitu faktor waktu dan faktor pengetahuan. Yang dimaksud dengan faktor waktu adalah keterkaitan modernisasi dengan waktu sekarang di mana yang ada sebelumnya dianggap tradisional dan ketinggalan zaman. Apa yang baru muncul seperti ilmu dan teknologi itulah yang harus diadopsi dalam pengorganisasian

ekonomi dan politik. Faktor penguasaan pengetahuan dan teknologi yang bersifat akumulatif sangat penting dalam proses modernisasi di mana negara-negara modern atau maju memiliki atau menguasai ilmu dan teknologi lebih banyak daripada negara-negara yang belum modern. Dengan demikian ada perbedaan yang jelas antara modernisasi dan pembangunan (development). Misalnya, industrialisasi (pembangunan industri) merupakan perwujudan dari modernisasi karena merupakan peningkatan dan efisiensi proses produksi dengan menggunakan teknologi dan management modern. Tetapi industrialisasi belum tentu merupakan pembangunan karena hanya menguntungkan sekelompok pemilik modal sambil mengorbankan mayoritas rakyat yang tanahnya diserobot untuk kepentingan industri. Bahkan kehadiran industri dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Pembangunan rumah-rumah mewah, pusat perbelanjaan, hotel merupakan bagian dari modernisasi kota. Tetapi belum tentu membawa dampak positif bagi pembangunan mayoritas masyarakat di kota tersebut. Jadi, sesungguhnya yang disebut pembangunan adalah segala usaha baik oleh aktor negara maupun non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan secara nyata kesejahteraan sosial ekonomi bagi suatu masyarakat. Misalnya, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan bagi rakyat kecil, peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan sarana air bersih, dan sebagainya.

Persoalan utama yang terjadi di negara-negara berkembang adalah upaya pemerintah yang berkuasa untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai sumber legitimasi kekuasaan sehingga kemudian menjadi semacam ideologi yang tidak boleh diganggu gugat. Inilah yang disebut gejala developmentalisme atau pembangunanisme yang justru menysangsarakan rakyat. Pemerintah melakukan segala sesuatu demi pembangunan tanpa kontrol yang efektif dari masyarakat. Pembangunan sebagai suatu public sphere (ranah publik) dimonopoli oleh negara yang cenderung bersikap represif. Pemerintah Orde Baru merupakan contoh dari rezim yang menerapkan ideologi developmentalisme. Gejala ini tentu membawa berbagai dampak negatif bagi rakyat Indonesia. *Pertama*, pembangunan hanya memperhatikan target pencapaian angka pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan sama sekali aspek distribusi demi pemerataan dan keadilan sosial. Kesenjangan sosial terjadi antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, kaya dan miskin, sektor industri (modern) dan sektor pertanian (tradisional). *Kedua*, pembangunan mengorbankan pelestarian lingkungan hidup. Penerapan ilmu dan teknologi modern dalam eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan dan marjinalisasi penduduk

setempat. Gejala ini sudah terjadi di Kalimantan, Papua dan Aceh. *Ketiga*, hak-hak sipil dan politik rakyat dikorbankan demi terciptanya stabilitas politik negara dan suksesnya program pembangunan pemerintah. *Keempat*, berkembangnya mental easy going di kalangan penguasa di mana mereka dengan mudah meningkatkan utang luar negeri sebagai sumber pendanaan pembangunan tanpa mempertimbangkan beban bagi rakyat dalam mengembalikan uang tersebut. Utang luar negeri bahkan disebut sebagai pendapatan pembangunan dalam APBN. *Kelima*, korupsi merajalela terutama terjadinya kolusi antara penguasa dengan pengusaha karena kolaborasi keduanya menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. *Keenam*, semakin mudarnya kreativitas dan inisiatif bangsa Indonesia untuk memikirkan pembangunan yang lebih bersifat mandiri. Atau dengan kata lain, telah muncul mental ketergantungan. Hal ini terutama sangat dirasakan ketika pemerintah dan rakyat Indonesia hendak mengakhiri kerjasama dengan IMF. *Ketujuh*, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan keamanan terhadap setiap upaya yang ingin menggagalkan pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas nasional. Pendekatan keamanan ini sudah digunakan untuk menindas gerakan separatis di Aceh dan Papua.

Modernisasi yang terjadi di negara-negara berkembang sejak tahun 1950an (pasca dekolonisasi) adalah proses yang dipaksakan dan berlangsung cepat. Proses yang sama di negara-negara yang sudah lebih dahulu maju seperti AS, Eropa Barat dan Jepang berjalan secara gradual sehingga mereka bisa mencapai demokrasi yang matang dewasa ini. Di Indonesia proses modernisasi ini berjalan begitu pesat di bawah pemerintahan Orde Baru. Tidaklah mengherankan kalau proses modernisasi ini memunculkan masalah-masalah sosial dan politik yang dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini. Perubahan drastis yang dibawa oleh modernisasi mengakibatkan pergolakan sosial, konflik etnis dan keagamaan akibat kesenjangan sosial dan pertentangan nilai, gerakan separatis, serta masalah-masalah sosial lainnya terutama di wilayah perkotaan. Munculnya masalah - masalah ini dalam masyarakat dijadikan pembenaran oleh penguasa untuk menerapkan politik pemerintahan yang otoriter dan represif.

Menurut Remigio E. Agpalo (1992) kecenderungan modernisasi untuk memunculkan otoriterisme dan hegemoni harus diimbangi dengan proses civilization. Yang dimaksud dengan civilization adalah proses transformasi dari situasi barbarisme (yang kuat menaklukkan yang lemah, yang modern harus menang atas yang tradisional, kota harus lebih penting dari desa,

pusat menjadi tuan dan daerah menjadi hamba, rakyat harus tunduk dan bertanggung jawab kepada penguasa dan bukan sebaliknya) menjadi kondisi yang dicirikan oleh pembangunan politik, kebebasan dan demokrasi. Ada tiga indikator utama pembangunan politik yaitu: tegaknya hukum (*rule of law*), *civility* (rasa kebersamaan dan kesederajadan untuk membela kepentingan umum, mengutamakan dialog dan bukan pemaksaan kehendak, mencari konsensus dan menghindari penggunaan kekerasan) dan keadilan sosial. Langkanya tiga indikator ini di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa yang kita lakukan sampai sekarang barulah modernisasi politik dan bukan pembangunan politik (*political development*). Yang dimaksud dengan modernisasi politik adalah penciptaan lembaga-lembaga politik modern seperti partai politik dan pemilihan umum yang kemudian dalam perkembangannya menjadi tujuan dalam dirinya sendiri (*an end in itself*). Akibatnya modernisasi politik hanya menciptakan elitisme politik atau manipulasi organisasi politik modern demi kepentingan segelintir elit politik. Pembangunan politik, sebaliknya, meningkatkan perwujudan dua indikator utama demokrasi yaitu: kontrol masyarakat yang efektif dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak (*publik*) dan kesetaraan kedudukan setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, status sosial ekonomi dan warna kulit (*democratic citizenship*). Keadilan sosial terwujud bila semua orang tanpa memandang latar belakangnya memiliki akses yang sama terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup layak sebagai manusia.

Dalam bukunya yang berjudul *Getting to the 21<sup>st</sup> Century: Voluntary Action and the Global Agenda* David C. Korten (1990) menyatakan bahwa model pembangunan ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan telah menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan miskin serta krisis ekologis yang mengancam masa depan kehidupan manusia dan peradaban dunia. Ada tiga unsur pokok yang terdapat dalam krisis global sebagai akibat penekanan pada pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Ketiga unsur tersebut adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan kekerasan komunal. Saat ini diperkirakan ada 1 sampai 1.2 milyar manusia hidup dalam kemiskinan absolut artinya mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal seperti sandang, pangan, perumahan dan air bersih. Menurut data PBB antara tahun 1960 sampai 1989 porsi pendapatan global yang dinikmati oleh seperlima penduduk dunia yang terkaya meningkat dari 70 persen menjadi 83 persen. Sedangkan porsi untuk seperlima penduduk yang miskin merosot dari 2.3 persen menjadi 1.4 persen (Ghai and Hewitt de Alcantara, 1994:9). Sementara negara-negara telah gagal mengurangi emisi gas akibat industrialisasi sehingga terjadi

polusi udara dan pemanasan global penggundulan dan pembakaran hutan terus terjadi di negara-negara tropis sehingga mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, karena hancurnya keutuhan sosial akibat modernisasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang mengabaikan unsur keadilan sosial maka aksi-aksi kekerasan yang kemudian berkembang menjadi kekerasan komunal di mana terjadi tumpang tindih antara diferensiasi komunal berdasarkan agama dan kesukuan dengan ketimpangan ekonomi. Contoh, perbedaan etnis di Indonesia tumpang tindih dengan kesenjangan ekonomi sehingga sangat mudah menyulut kekerasan komunal anti etnis tertentu.

Sikap yang menyamakan pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan umat manusia (human progress) mendorong para politisi dan perencana pembangunan untuk menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai solusi terhadap krisis yang disinggung di atas. Demikianlah IMF dan Bank Dunia mendikte bangsa Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi. Kenyataan yang terjadi adalah utang luar negeri yang semakin meningkat, pengangguran yang tak terkendali dan pelayanan publik yang semakin merosot. Pada saat yang sama sumber daya alam dieksploitasi secara ekshaustif guna mengakumulasi devisa untuk membayar utang. Korten mengemukakan data empiris bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi krisis global. Dikatakan bahwa pada tahun 1990 keluaran ekonomi global per tahun mencapai empat kali lipat dibanding dengan pencapaian pada tahun 1950. Kalau pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan solusi seharusnya dunia tidak mengalami penyebaran kemiskinan yang semakin luas, kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah dan disintegrasi sosial yang bernuansa kekerasan. Munculnya berbagai krisis di atas merupakan akibat dari asumsi yang salah dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan pengeluaran untuk biaya pengobatan kanker akibat polusi zat kimia tertentu yang dihasilkan oleh peningkatan industrial output dihitung sebagai pertambahan dalam GNP. Selain itu kita juga memiliki persepsi yang keliru tentang daya dukung sumber daya alam yang ternyata ada terbatas dan bahkan dalam abad 21 Indonesia harus menghadapi kelangkaan minyak, gas alam dan air bersih. Dalam analisisnya Korten membangun kontras antara pertumbuhan ekonomi dengan ekologi dan kehidupan komunitas. Karena pertumbuhan ekonomi menciptakan kesenjangan ekonomi dan merusak lingkungan hidup maka semakin suatu masyarakat mengejar pertumbuhan ekonomi maka semakin terancam pula integrasi sosial dalam masyarakat tersebut sehingga tidak lagi tercipta komunitas kemanusiaan (human community).

Modernisasi selalu mengandung hegemoni oleh manusia atas manusia lain dan hegemoni atas alam.

### **Strategi Pembangunan Alternatif?**

Dalam tulisannya yang berjudul “Developmental States and Crony Capitalists” James Putzel (2002) menegaskan salah satu kekeliruan terbesar yang dilakukan negara-negara Asia termasuk Indonesia dalam proses pemulihan ekonomi adalah secara berlebihan mengandalkan masuknya *footloose capital*. Ia menulis: *If nothing else, the crisis of the late 1990s should seriously put into question the wisdom of pursuing a development strategy that relies so heavily on the attraction of footloose capital.* Lebih-lebih lagi setelah terjadinya ledakan bom di Kuta Bali tanggal 12 Oktober yang lalu strategi pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan *footloose capital* ini semakin tidak relevan karena *country risk* Indonesia menjadi sangat tinggi. Di bawah tekanan IMF Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk menarik investor asing. Tapi apa yang kita peroleh dalam lima tahun belakangan ini? Bukan saja investor baru tidak masuk, yang sudah ada di Indonesia pun justru ingin angkat kaki. Bukankah ini berarti bahwa fungsi IMF sebagai *seal of approval* bagi investasi asing hanya menjadi janji yang kosong?

Dalam ekonomi politik internasional ada asumsi bahwa interaksi ekonomi internasional tidak pernah terjadi di dalam kevakuman politik. Sebaliknya, interaksi tersebut senantiasa berlangsung dalam konstelasi dan konfigurasi politik tertentu. Demikian pun rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah krisis ekonomi Asia kental dengan nuansa politik pasca perang dingin di mana ada pergeseran dari pertarungan geopolitik-ideologis menuju kompetisi geoekonomi. Sejak awal 1990an kekuatan Anglo-Amerika yang *excited* dengan keruntuhan komunisme Uni Soviet semakin merasa terancam dengan kebangkitan ekonomi negara-negara Asia Timur yang dipelopori oleh Jepang. Niat dan ambisi menyebarkan liberalisasi ekonomi ke seluruh dunia terhambat oleh pola pembangunan di Asia Timur dengan teorinya tentang peran negara yang aktif dalam pembangunan (*developmental state theory*). Menurut teori ini negara seharusnya memainkan peran utama dalam mengarahkan pembangunan ekonomi dan tidak sekadar mengikuti dikte kekuatan pasar (Robert Wade, 1990).

Di mata negara-negara Barat intervensi negara tidak hanya menyalahi prinsip *market economy* tetapi juga akan menghambat penetrasi mereka ke dalam sektor-sektor ekonomi

strategis di Asia. AS, misalnya, sering kecewa karena sulitnya produk-produk Amerika menembus pasar Jepang dan ketatnya jaringan bisnis yang didukung oleh birokrasi pemerintah. Negara-negara industri baru (NICs) seperti Korea Selatan dan Taiwan juga mulai merebut pangsa pasar untuk produk-produk industri yang tadinya hanya dikuasai oleh negara-negara industri maju. Kebangkitan industri manufaktur juga terjadi di Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Dalam buku yang berjudul *Rethinking Development in Asia: From Illusionary Miracle to Economic Crisis*, Pietro P. Masina (2002) mengatakan memang sulit menemukan bukti bahwa kekuatan AngloAmerika sengaja menghancurkan strategi *developmental state* di Asia melalui krisis moneter tahun 1997. Tetapi menyimak apa yang dipaksakan oleh pemerintah AS dan IMF melalui apa yang dikenal dengan “Washington Consensus” terhadap negara-negara Asia termasuk Indonesia setelah krisis terjadi sulit bagi kita untuk percaya bahwa pengebirian *developmental state* hanya merupakan keinsidensi belaka. Kita sudah menyaksikan bagaimana IMF “menekan” pemerintah Indonesia agar segera mendivestasikan aset-aset strategis yang dikuasai BPPN meskipun dengan harga yang murah.

Rangkaian peristiwa sejak pertengahan tahun 1980an sampai terjadinya krisis moneter tahun 1997 menunjukkan adanya usaha secara konsisten kekuatan hegemonik Anglo-Amerika untuk melumpuhkan unsur-unsur *developmental state* yang diyakini telah menciptakan keajaiban ekonomi Asia. Saat ini tatkala harapan Indonesia akan datangnya investasi asing nyaris sirna, bukankah revitalisasi teori *developmental state* bisa memberikan alternatif kebijakan yang patut dipertimbangkan? Memang ada pendapat bahwa menghidupkan kembali teori *developmental state* sama dengan menciptakan peluang bagi maraknya *crony capitalism* seperti pada masa Orde Baru. Kekhawatiran seperti itu agak berlebihan karena sejalan dengan konsolidasi demokrasi yang terus diupayakan pengawasan terhadap perilaku pejabat negara oleh legislatif dan *civil society* pada masa yang akan datang akan semakin kuat.

Dalam makalahnya yang berjudul “Globalization, Debt and Development: Lesson and Policy Alternatives Facing Indonesia” J. Mohan Rao (2002) menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia harus menolak cara berpikir yang ditanamkan oleh negaranegara donor dan IMF selama ini bahwa tidak ada alternatif lain bagi Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi selain mengimplemenstasikan butir-butir yang ada dalam kesepakatan dengan IMF (LoI). Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan untuk menentukan pilihan apakah kita harus



melanjutkan preskripsi kebijakan ekonomi yang didikte oleh IMF yang ternyata tidak membawa hasil atau merumuskan strategi baru dengan mengandalkan seluruh potensi bangsa ini. Jika kita memilih untuk merumuskan strategi pembangunan yang baru maka beberapa point pemikiran Rao layak untuk dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah.

*Pertama*, pengurangan atau penghapusan sebagian utang luar negeri (*debt relief*) merupakan hal yang mutlak dan mendesak untuk dilakukan. Cicilan utang yang dibayar Indonesia setiap tahun anggaran sejak 1997 jauh lebih besar dari utang baru yang diperoleh dari CGI untuk menutup defisit APBN. Dengan demikian setiap tahun terjadi *net capital outflow* dari Indonesia ke negara-negara donor. Kalau demikian kenyataannya, bagaimana mungkin Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga bisa menyerap angka pengangguran yang setiap tahun bertambah 2,5 juta orang? Tuntutan pengurangan atau penghapusan sebagian utang ini cukup adil karena Bank Dunia pun mengakui bahwa sebagian dari utang luar negeri dikorupsi dan tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. *Kedua*, untuk menggairahkan investasi oleh pihak swasta baik domestik maupun asing pemerintah tidak lagi mengandalkan kesuksesan implementasi *Letter of Intent* (LoI) dengan IMF yang selama ini sudah terbukti tidak memberikan hasil, tetapi melalui *public investment* dalam bidang pertanian dan sektor informal mengingat kedua sektor ini merupakan konsentrasi penduduk miskin. Selain itu investasi di bidang usaha kecil dan menengah (UKM) juga perlu mendapat prioritas. Dengan demikian karakteristik utama dari *public investment* ini adalah *preferential option for the poor*. Sumber dana utama untuk keperluan investasi publik ini adalah optimalisasi pemungutan pajak yang selama ini masih belum optimal. *Ketiga*, Indonesia dapat meniru apa yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan dalam memajukan industri untuk kepentingan ekspor di mana industri-industri yang bersifat strategis dan berpeluang untuk ekspansi didorong dan difasilitasi sehingga mampu bersaing di pasar global.

Dari ketiga hal yang disebutkan di atas kita melihat bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menerapkan kembali teori *developmental state* demi mengembalikan level pertumbuhan ekonomi yang pernah dicapai sebelum tahun 1997. Persoalannya sekarang adalah apakah pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati memiliki keberanian untuk mengambil resiko perubahan rezim kebijakan yang drastis. Secara politik perubahan kebijakan tersebut mungkin tidak *feasible* karena lazimnya selama periode konsolidasi demokrasi

pemerintah yang sedang berkuasa cenderung menempuh kebijakan dengan resiko politik yang minimum. Kendati demikian, mengingat taruhannya adalah nasib duaratusan juta rakyat Indonesia dan generasi yang akan datang maka pilihan kebijakan yang agak populis justru akan meningkatkan popularitas seorang pemimpin.

Seorang pelopor studi pertumbuhan ekonomi yang bernama Moses Abramovitz (1989) mengatakan bahwa persyaratan fundamental bagi pembangunan ekonomi adalah terciptanya *social capacity* artinya pembangunan ekonomi bukanlah sekedar masalah teknis akumulasi faktor seperti capital. Thus, pembangunan Indonesia bukan sekedar mendatangkan investasi asing tetapi merupakan suatu proses sosial yang menuntut keterlibatan negara dalam menciptakan lembaga-lembaga ekonomi, memajukan perilaku sosial yang progresif dan menempuh kebijakan yang mampu mendorong pembangunan tersebut (Robert Gilpin, 2000). Karena pembangunan ekonomi merupakan suatu proses interaksi sosial menuju taraf hidup yang lebih baik maka kita harus menolak epistemologi pembangunan versi IMF yang menggeneralisasi dan memutlakkan peran *footloose capital* untuk semua negara berkembang di mana pun.

## Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang terjadi di Indonesia sejak awal Orde Baru sampai sekarang barulah sebatas modernisasi ekonomi dan politik dan belum merupakan pembangunan ekonomi dan politik dalam pengertian peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata serta partisipasinya dalam penyelenggaraan kekuasaan. Bahkan setelah Indonesia masuk dalam era reformasi sekalipun pertumbuhan ekonomi tetap dilihat sebagai solusi untuk mengatasi berbagai krisis seperti kemiskinan yang meluas, kerusakan lingkungan hidup dan konflik-konflik komunal. Fokus pada pertumbuhan ekonomi telah mengantar bangsa Indonesia pada suatu keadaan di mana rakyat dibebani dengan pembayaran utang luar negeri. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin bertambah parah takkala daerah dengan otonominya berusaha mengeksploitasi kekayaan alam yang tersisa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memperlemah kohesi sosial rakyat Indonesia sehingga mudah terjadi konflik berbau SARA. Untuk mengatasi krisis yang diakibatkan oleh modernisasi diperlukan proses *civilization* baik pada level *society* maupun negara. Dalam proses tersebut tiga tujuan harus tercapai yaitu *rule of law*, *civility* dan *social justice* seperti yang sudah dijelaskan di depan. Namun perlu ditambahkan bahwa dalam konteks globalisasi sekarang ini diperlukan transnasionalisasi demokrasi karena demokrasi pada level nation-state saja tidak cukup untuk menjamin terciptanya popular control dan political equality sebagai dua syarat utama demokrasi. Dengan kata lain diperlukan adanya demokratisasi *international public sphere*. Dominasi kekuatan-kekuatan kapital global dalam ranah tersebut hanya akan memperkuat hegemoni atau dominasi oleh manusia atas manusia lain dan dominasi manusia atas alam yang bersifat destruktif.

## Referensi

- Agpalo, R.E., "*Modernization, Development, and Civilization: Reflections on the Prospects of Political Systems in the First, Second, and Third Worlds*" in Kenneth E. Bouzon (ed.) *Development and Democratization in the Third World*, Washington: Taylor and Francis, 1992.
- Aleksius Jemadu, "*Effective Leaders Needed to Manage Social Conflict*", The Jakarta Post, April 2, 1997.
- Aleksius Jemadu, "*Globalisasi: Antara Tantangan dan Peluang*", Kompas, 12 Desember 2000.
- Aleksius Jemadu, "*Demokrasi Global*", Kompas, 30 Mei 2001.
- Armijo, Leslie Elliot, Thomas J. Biersteker and Abraham F. Lowenthal, "*The Problems of Simultaneous Transitions*" dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.), *Economic Reform and Democracy*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1995.
- Beetham, David, *Democracy and Human Rights*, London: Polity Press, 1999.
- Booth, Anne, "*Can Indonesia Survive as Unitary State?*", *Indonesia Circle* No. 58 June 1992.
- Dryzek, John S., *Deliberative Democracy: Liberals, Critics, Contestations*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy: Towards Consolidation*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1999.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992.
- Held, David, *Democracy and the Global Order: From the Nation-state to Cosmopolitan Governance*, Cambridge: Polity, 1995.
- Korten, David, C., *Getting to the 21<sup>st</sup> Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, Hartworth: Kumarian Press, 1990.
- Krugman, Paul, "*The Myth of Asia's Miracle*", Pacific Affairs, August 1995.
- Lairson, T. and David Skidmore, *International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth*, Fort Worth: Harcourt Brace, 1997.

Pastor, Manuel J., “*The Effects of IMF Programs in the Third World: Debate and Evidence from Latin America*” in C. Roe Goddard, John T. Passe-Smith and John G. Conklin (eds.), *International Political Economy: State- Market Relations in the Changing Global Order*, Boulder: Lynne Rienner, 1996.

Strange, Susan, *State and Markets: An Introduction to International Political Economy*, London: Pinter Publishers, 1995.